

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perekonomian Bangka Belitung Triwulan II-2016 tumbuh sebesar 3,67% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya 3,32% (yoy). Peningkatan bersumber dari meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat adanya momen liburan sekolah dan persiapan menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri dan meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan jasa perusahaan. Inflasi Bangka Belitung berada sedikit diatas rentang sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar $4\% \pm 1\%$ (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2016 diperkirakan meningkat didukung membaiknya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya investasi serta realisasi pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah yang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Ekspor diperkirakan mulai meningkat seiring dengan mulai membaiknya harga komoditas timah. Sementara itu, tekanan inflasi diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dan dalam level yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada Triwulan III-2016 diperkirakan tumbuh terbatas pada kisaran 3,7%-4,1% (yoy) dan di triwulan IV diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,8%-4,3% (yoy). Sementara secara tahunan diperkirakan perekonomian Bangka Belitung pada 2016 tumbuh pada kisaran 3,6%-4,0% (yoy).

Pada triwulan IV 2016 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan berada dalam kisaran target Bank Indonesia $4\% \pm 1\%$ (www.bi.go.id. 2017).

Optimisme pemerintah provinsi Bangka Belitung dengan target yang ingin dicapai yaitu menyamai target pertumbuhan ekonomi nasional semakin sejalan dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya perekonomian di berbagai sektor baik dari pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Serta telah didukung tata kelola keuangan daerah yang baik, selain itu kinerja keuangan daerah juga menjadi faktor pendukung dalam perbaikan stabilitas keuangan daerah sehingga hal ini dapat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian Bangka Belitung.

Pertumbuhan perekonomian Bangka Belitung pada data tahun 2017 berbanding terbalik dengan data yang ditunjukkan pada tahun 2016 yaitu dengan dibuktikan Pertumbuhan ekonomi Babel Triwulan II 2017 tumbuh sebesar 5,36% (yoy) atau sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,40% (yoy) sampai dengan semester I 2017, pertumbuhan ekonomi Babel sebesar 5,87% (ctc) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,65% (ctc) (Bangka pos.com 2017).

Penurunan ekonomi daerah dinilai karena melemahnya sektor pertambangan, karena harga jual timah sempat anjlok dari 20.000 dollar AS menjadi 15.000 dollar AS per metrik ton. Selain dipicu melemahnya sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi tertahan karena terbatasnya lapangan kerja serta inflasi harga kebutuhan pokok serta hal ini juga didukung oleh sistem

pelayanan publiknya kemudian tata kelola keuangan serta pengelolaan keuangan yang diukur dari bagaimana kinerja keuangan daerah.

Menurut kepala bidang ekonomi daerah, target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan perbaikan tatakelola keuangan daerah sehingga predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian hal ini juga didukung oleh kinerja keuangan daerah Bangka Belitung. Kinerja keuangan merupakan tolak ukur dari penilaian posisi keuangan baik perusahaan maupun pemerintah. Hal ini merupakan indikator yang kuat dalam menilai bagaimana kinerja dari perusahaan maupun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini di dapatkan dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber data dan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan baik keuangan perusahaan maupun keuangan daerah, hal ini dikarenakan adanya pengawasan mencakup elemen-elemen yang menggambarkan keadaan keuangan, baik perusahaan maupun keuangan daerah pada periode tertentu dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi dan kinerja keuangan. Proses penetapan dan pencapaian tujuan membutuhkan ketelitian, keakuratan, serta kecepatan manajemen dalam pengambilan keputusan serta dalam pengelolaannya.

Laporan keuangan juga digunakan sebagai media untuk melihat kondisi kesehatan suatu lembaga yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu dapat juga digunakan untuk nilai kondisi keuangan dan presentasi perusahaan,

pihak manajemen memerlukan tolak ukur. Tolak ukur yang umumnya digunakan dalam perusahaan adalah rasio keuangan.

Menurut PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan per 1 Januari 2017, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Rasio menggambarkan suatu hubungan dari perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Dengan menggunakan rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada manajemen tentang baik buruknya keuangan atau kesehatan perusahaan. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi analisis atau pihak manajemen yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak membentuk rasio.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kuangan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti

dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan yang meliputi:
 - a) Dana Bagi Hasil
 - b) Dana Alokasi Umum
 - c) Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari menteri keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan menteri dalam negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat

berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan laporan keuangan yang meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca Daerah; 3) Laporan Aliran Kas; dan 4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penelitian mengenai analisis kinerja keuangan telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abbas, *et al* (2016), meneliti tentang *Financial Performance of Banks in Pakistan after Merger and Acquisition* (Kinerja Keuangan Bank di Pakistan setelah Merger dan Akuisisi) dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan positif dalam kinerja keuangan dari bank-bank di Pakistan setelah merger dan akuisisi, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Puatwoe dan Piabuo (2016), meneliti tentang *Financial Sector Development and Economic Growth: Evidence from Cameroon* (Pengembangan Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi: Bukti dari Kamerun) dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya dampak positif dan jangka panjang dari semua indikator pengembangan keuangan pada pertumbuhan ekonomi melalui uji batas. Oleh karena itu, diusulkan bahwa reformasi keuangan di Kamerun harus di dorong ke depan untuk meningkatkan perkembangan sektor keuangan sehingga terjadi peningkatan perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu penelitian dilakukan oleh Ropa (2016), meneliti tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan hasilnya menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio

efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas berpengaruh baik, rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu akan tetapi ada perbedaan yang mendasar membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saya ini yaitu dalam penelitian ini saya menggunakan tujuh tahun periode data. Jika penelitian terdahulu mengukur kinerja perusahaan suatu negara, maka penelitian saya ini mengukur lebih khusus lagi yaitu mengukur kinerja keuangan daerahnya. Jika penelitian sebelumnya menggunakan periode data empat tahun saja dan mengukur kinerja daerah kabupaten, maka penelitian saya menggunakan tujuh tahun periode data dan mengukur kinerja daerah provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberi judul penelitian ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2016).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yaitu:

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010-2016 dilihat dari Rasio Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian Keuangan Daerah, Aktifitas, dan Rasio Pertumbuhan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh analisis kinerja keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung di lihat dari Rasio Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian Keuangan Daerah, Aktifitas, Pertumbuhan dari tahun 2010-2016 melalui laporan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka peneliti hanya membahas tiap-tiap variabel sesuai dengan identifikasi masalah pada judul penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016 di lihat dari Rasio Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian Keuangan Daerah, Aktifitas, dan Rasio Pertumbuhan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya yang terkait dengan kinerja keuangan Daerah.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai keuangan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan usulan penelitian ini akan dibagi dalam tiga tahapan dengan perincian sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Mendeskripsikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan tentang analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis statistik yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.